

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERGESERAN MAKNA UPACARA TABUH RAH MENJADI PERBUATAN TAJEN YANG MENGANDUNG UNSUR PERJUDIAN	
A. Perbuatan Tajen Sebagai Cikal Bakal Bergesernya Makna Tabuh Rah...	35
1. Sejarah dan latar belakang upacara Tabuh Rah.....	35
2. Makna Tabuh Rah Dalam Hukum Adat Bali.....	46
3. Pergeseran Makna Tabuh Rah.....	52
B. Tajen Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana KUHP Sebagai Tindak Pidana Perjudian.....	53
1. Pemahaman Tajen Dalam Hukum Pidana Adat.....	53
2. Pandangan Hukum Adat.....	54
3. Pandangan Hukum Terhadap Masyarakat Adat.....	59
4. pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	61
5. unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	68
6. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PERBUATAN TAJEN YANG MENGANDUNG UNSUR PERJUDIAN	
A. Kasus Posisi.....	75
1. Identitas Terdakwa.....	75
2. Kronologi Kasus.....	76
4. Dakwaan Penuntut Umum.....	78

1.

5. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar.....	79
B. Upaya Penyelesaian Kasus.....	80
1. Penyebab Pergeseran Makna Tradisi Tabuh Rah Menjadi <i>Tajen</i>	80
2. Perkembangan Tabuh Rah Menjadi <i>Tajen</i> Yang Mengandung Unsur Perjudian.....	83
3. Upaya Penanggulangan Agar Kembalinya Makna Tradisi Yang Sesungguhnya.....	87

BAB IV PERGESERAN MAKNA UPACARA “TABUH RAH” MENJADI PERBUATAN “TAJEN” YANG MENGANDUNG UNSUR PERJUDIAN DALAM MASYARAKAT ADAT BALI

A. Penyebab Bergesernya Makna Upacara Tabuh Rah Menjadi Perbuatan Judi “Tajen”.....	93
B. Perkembangan Upacara Tabuh Rah Sehingga Dapat Dikatakan Sebagai Judi “Tajen”.....	97
C. Penanggulangan Agar Makna Upacara Tabuh Rah Kembali Menjadi Makna Yang Sakral ..	104
1. Memperbaiki Makna Sakral Dari Upacara Tabuh Rah.....	104
2. Sinkronisasi Hukum Adat dan Hukum Pidana.....	107
3. Koordinasi Aparat Adat Dan Aparat Negara Dalam Menerapkan Hukum Adat dan Hukum Pidana.....	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA.....	xii
---------------------	-----

LAMPIRAN.....	
---------------	--